

ABSTRAK

Titin Wartini. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Provinsi Jawa Barat (Analisis Pasal 4 Huruf C Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa).

Penderita gangguan jiwa seringkali dianggap menjadi penggagu keberadaannya bagi masyarakat lainnya. Sehingga hak – hak penderita gangguan jiwa sebagai warga negara yang sama tidak terpenuhi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu perlunya kerjasama berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesehatan jiwa yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang ditinjau dengan asas-asas Siyasah Dusturiyah dan mengetahui hasil yang telah diwujudkan dari implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dan tanggung jawab negara serta tinjauan siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan masalah yang diambil oleh penulis

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kasus pada suatu wilayah untuk menggabungkan fakta yang ada menjadi data-data empirik dengan melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dengan menyediakan puskesmas yang melakukan deteksi dini dan mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan dalam menangani ODGJ sebagai upaya preventif, melakukan pelayanan sesuai standard sebagai upaya kuratif, mendirikan rumah sakit jiwa provinsi jawa barat sebagai upaya rehabilitatif. Kemudian hasil dari implementasi kebijakan tersebut pemerintah provinsi Jawa Barat telah membuat program WALAGRI untuk pelatihan kehidupan ODGJ. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan jiwa dapat dilihat dari asas-asas dan prinsip-prinsip Dusturiyah yang terkandung dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tersebut.

Kata Kunci : Hak ODGJ, Implementasi, Perlindungan Peraturan Daerah